



**BUPATI BIMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI BIMA  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIMA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 104);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2022 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat BDPRD, adalah dana yang diterima Desa 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PENGALOKASIAN BDPRD

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BDPRD setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (3) Berdasarkan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan rincian besaran BDPRD untuk setiap Desa.
- (4) Pengalokasian BDPRD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 40% (empat puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 60% (enam puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan dari Desa masing-masing.
- (5) Bagi Desa dengan realisasi 0% (nol persen) untuk penyeteran pajak bumi bangunan nya, dialokasikan hanya sebesar 40% dari ketentuan ayat (4) huruf a.
- (6) Besaran BDPRD yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

### BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN BDPRD

#### Pasal 3

- (1) Penyaluran BDPRD setiap desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin setiap bulannya dan secara bertahap.
- (3) Penyaluran BDPRD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menerima persyaratan penyaluran.
- (4) Penyaluran BDPRD untuk honor jurut pungut dan insentif staf administrasi BPD dapat dilakukan setiap bulannya bagi desa yang capaian pembayaran PBB P2 telah memenuhi 85 (delapan puluh lima persen) dari target tahun sebelumnya.
- (5) Penyaluran BDPRD untuk penyediaan operasional BPD dan penyediaan operasional Pemerintah Desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap 1 (satu) sebesar 60 (enam puluh persen) dan
  - b. tahap 2 (dua) sebesar 40 (empat puluh persen).
- (6) Penyaluran DBPRD untuk tahap pertama sebesar 60 (enam puluh persen) sebagaimana pada ayat (5) point a akan dilakukan apabila capaian pelunasan pembayaran PBB P2 sebesar 25 (dua puluh lima persen) dari jumlah target pajak.
- (7) Penyaluraan BDPRD untuk tahap kedua sebesar 40 (empat puluh persen) sebagaimana pada ayat (5) point b akan dilakukan apabila capaian pelunasan pembayaran PBB P2 sebesar 75 (tujuh puluh lima persen) dari target pajak.

### BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BDPRD

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan BDPRD diprioritaskan untuk kegiatan honor Juru Punggut, Staf Administrasi BPD, Penyediaan Operasional BPD dan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan BDPRD dapat dilakukan pada kegiatan lain pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa setelah perioritas penggunaan BDPRD sebagaimana ketentuan ayat (1) terpenuhi.
- (3) Penggunaan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada prioritas penggunaan BDPRD yang dituangkan dalam RKPDesa.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Bima.

Ditetapkan di Bima  
pada tanggal, 2 Januari 2023

**BUPATI BIMA,**

ttd

**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**

Diundangkan di Bima  
pada tanggal, 2 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,**

ttd

**H.M. TAUFIK HAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2023 NOMOR 2.....

Sesuai Salinan dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Nip. 196603111993031007

AMPIRAN I  
NOMOR  
TANGGAL

: PERATURAN BUPATI BIMA  
: 2 TAHUN 2023  
: 2 Januari 2023

NO	KECAMATAN / DESA	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			KET.
		Alokasi Bagi Secara Merata (40%)	Alokasi Bagi Secara Proporsional (60%)	Jumlah Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa	
1	2	3	4	5 = 3+4	6
<b>I</b>	<b>MONTA</b>				
1	Tolotangga	10,235,620.00	10,000,109.00	20,235,729.00	
2	Sondo	10,235,620.00	9,976,880.00	20,212,500.00	
3	Simpasai	10,235,620.00	14,583,183.00	24,818,803.00	
4	Sie	10,235,620.00	19,861,035.00	30,096,655.00	
5	Tangga	10,235,620.00	9,960,369.00	20,195,989.00	
6	Monta	10,235,620.00	18,333,481.00	28,569,101.00	
7	Sakuru	10,235,620.00	8,636,613.00	18,872,233.00	
8	Baralau	10,235,620.00	4,515,509.00	14,751,129.00	
9	Tolouwi	10,235,620.00	3,426,397.00	13,662,017.00	
10	Wilamaci	10,235,620.00	1,451,723.00	11,687,343.00	
11	Pela	10,235,620.00	7,556,268.00	17,791,888.00	
12	Tangga Baru	10,235,620.00	11,884,410.00	22,120,030.00	
13	Nontotera	10,235,620.00	2,280,225.00	12,515,845.00	
14	Waro	10,235,620.00	11,375,693.00	21,611,313.00	
		<b>143,298,680.00</b>	<b>133,841,895.00</b>	<b>277,140,575.00</b>	
<b>II</b>	<b>BOLO</b>				
1	Tambe	10,235,620.00	17,424,529.00	27,660,149.00	
2	Rasabou	10,235,620.00	9,608,973.00	19,844,593.00	
3	Rato	10,235,620.00	46,712,828.00	56,948,448.00	
4	Kananga	10,235,620.00	29,800,238.00	40,035,858.00	
5	L e u	10,235,620.00	11,390,304.00	21,625,924.00	
6	Timu	10,235,620.00	14,519,878.00	24,755,498.00	
7	Bontokape	10,235,620.00	19,833,114.00	30,068,734.00	
8	Sondosia	10,235,620.00	8,966,039.00	19,201,659.00	
9	Ngembe	10,235,620.00	17,240,957.00	27,476,577.00	
10	Sanolo	10,235,620.00	8,783,470.00	19,019,090.00	
11	Tumpu	10,235,620.00	3,866,504.00	14,102,124.00	
12	Rada	10,235,620.00	12,906,252.00	23,141,872.00	
13	Kara	10,235,620.00	4,896,812.00	15,132,432.00	
14	Darussalam	10,235,620.00	3,673,179.00	13,908,799.00	
		<b>143,298,680.00</b>	<b>209,623,077.00</b>	<b>352,921,757.00</b>	
<b>III</b>	<b>WOHA</b>				
1	Keli	10,235,620.00	6,917,035.00	17,152,655.00	
2	Tenga	10,235,620.00	8,485,033.00	18,720,653.00	
3	Tente	10,235,620.00	26,854,745.00	37,090,365.00	
4	Rabakodo	10,235,620.00	18,290,286.00	28,525,906.00	
5	Samili	10,235,620.00	10,818,410.00	21,054,030.00	
6	Kalampa	10,235,620.00	17,930,410.00	28,166,030.00	
7	Risa	10,235,620.00	9,161,694.00	19,397,314.00	
8	Pandai	10,235,620.00	29,033,674.00	39,269,294.00	
9	Donggobolo	10,235,620.00	10,721,262.00	20,956,882.00	
10	Dadibou	10,235,620.00	22,016,353.00	32,251,973.00	
11	Talabiu	10,235,620.00	18,374,236.00	28,609,856.00	
12	Naru	10,235,620.00	10,173,112.00	20,408,732.00	
13	Nisa	10,235,620.00	10,582,275.00	20,817,895.00	
14	Waduwani	10,235,620.00	7,330,892.00	17,566,512.00	
15	Penapali	10,235,620.00	20,855,189.00	31,090,809.00	
		<b>153,534,300.00</b>	<b>227,544,606.00</b>	<b>381,078,906.00</b>	
<b>IV</b>	<b>BELO</b>				
1	Ncera	10,235,620.00	14,963,134.00	25,198,754.00	
2	Lido	10,235,620.00	8,106,445.00	18,342,065.00	
3	Ngali	10,235,620.00	11,264,347.00	21,499,967.00	
4	Renda	10,235,620.00	8,366,845.00	18,602,465.00	
5	Cenggu	10,235,620.00	9,778,640.00	20,014,260.00	
6	Runggu	10,235,620.00	6,088,284.00	16,323,904.00	
7	Soki	10,235,620.00	5,184,990.00	15,420,610.00	
8	Roka	10,235,620.00	9,127,537.00	19,363,157.00	
9	Diha	10,235,620.00	1,246,947.00	11,482,567.00	
		<b>92,120,580.00</b>	<b>74,127,169.00</b>	<b>166,247,749.00</b>	



NO	KECAMATAN / DESA	BAIGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			KET.
		Alokasi Bagi Secara Merata (40%)	Alokasi Bagi Secara Proporsional (60%)	Jumlah Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa	
1	2	3	4	5 = 3+4	6
<b>V WAWO</b>					
1	Tarlawi	10,235,620.00	12,046,801.00	22,282,421.00	
2	Ntosi	10,235,620.00	13,613,939.00	23,849,559.00	
3	Maria	10,235,620.00	22,775,060.00	33,010,680.00	
4	Pesa	10,235,620.00	25,226,991.00	35,462,611.00	
5	Raba	10,235,620.00	25,726,967.00	35,962,587.00	
6	Kambilo	10,235,620.00	19,657,457.00	29,893,077.00	
7	Musia Utara	10,235,620.00	16,577,245.00	26,812,865.00	
8	Kombo	10,235,620.00	29,107,690.00	39,343,310.00	
9	Riamau	10,235,620.00	5,042,646.00	15,278,266.00	
		<b>92,120,580.00</b>	<b>169,774,796.00</b>	<b>261,895,376.00</b>	
<b>VI SAPE</b>					
1	Sari	10,235,620.00	27,365,932.00	37,601,552.00	
2	Boke	10,235,620.00	10,731,868.00	20,967,488.00	
3	Jin	10,235,620.00	14,651,753.00	24,887,373.00	
4	Bugis	10,235,620.00	10,338,405.00	20,574,025.00	
5	Naru	10,235,620.00	31,105,621.00	41,341,241.00	
6	Rasubou	10,235,620.00	16,688,609.00	26,924,229.00	
7	Sungia	10,235,620.00	7,518,708.00	17,754,328.00	
8	Nae	10,235,620.00	10,023,990.00	20,259,610.00	
9	Rui Oi	10,235,620.00	15,560,738.00	25,796,358.00	
10	Purungina	10,235,620.00	7,652,304.00	17,887,924.00	
11	Kowo	10,235,620.00	19,140,159.00	29,375,779.00	
12	Buncu	10,235,620.00	9,178,729.00	19,414,349.00	
13	Poja	10,235,620.00	9,272,885.00	19,508,505.00	
14	Bujo Pulo	10,235,620.00	4,281,494.00	14,517,114.00	
15	Naru Barat	10,235,620.00	8,628,546.00	18,864,166.00	
16	Tannah Putih	10,235,620.00	12,224,749.00	22,460,369.00	
17	Lamere	10,235,620.00	3,774,147.00	14,009,767.00	
18	Oi Maci	10,235,620.00	6,052,157.00	16,287,777.00	
		<b>184,241,160.00</b>	<b>224,190,794.00</b>	<b>408,431,954.00</b>	
<b>VII WERA</b>					
1	Ntoke	10,235,620.00	6,675,060.00	16,910,680.00	
2	Pai	10,235,620.00	7,227,837.00	17,463,457.00	
3	Nunggi	10,235,620.00	19,486,910.00	29,722,530.00	
4	Tawali	10,235,620.00	24,035,052.00	34,270,672.00	
5	Hidirasa	10,235,620.00	5,347,167.00	15,582,787.00	
6	Wora	10,235,620.00	10,273,149.00	20,508,769.00	
7	Sangiang	10,235,620.00	11,234,518.00	21,470,138.00	
8	Bala	10,235,620.00	9,614,205.00	19,849,825.00	
9	Oi Tui	10,235,620.00	6,423,175.00	16,658,795.00	
10	Tadewa	10,235,620.00	5,417,202.00	15,652,822.00	
11	Nanga Wera	10,235,620.00	9,624,911.00	19,860,531.00	
12	Ranggalasolo	10,235,620.00	2,694,594.00	12,930,214.00	
13	Kalajena	10,235,620.00	8,645,186.00	18,880,806.00	
14	Mandala	10,235,620.00	6,226,738.00	16,462,358.00	
		<b>143,298,680.00</b>	<b>132,925,704.00</b>	<b>276,224,384.00</b>	
<b>VIII DONGGO</b>					
1	Doridungga	10,235,620.00	5,731,234.00	15,966,854.00	
2	Kala	10,235,620.00	5,838,018.00	16,073,638.00	
3	O'o	10,235,620.00	6,813,815.00	17,049,435.00	
4	Mbawa	10,235,620.00	12,082,825.00	22,318,445.00	
5	Palama	10,235,620.00	6,477,479.00	16,713,099.00	
6	Rora	10,235,620.00	3,465,499.00	13,701,119.00	
7	Mpiil	10,235,620.00	4,879,437.00	15,115,057.00	
8	Bumi Pajo	10,235,620.00	6,113,016.00	16,348,636.00	
9	Ndano NaE	10,235,620.00	2,983,126.00	13,218,746.00	
		<b>92,120,580.00</b>	<b>54,384,449.00</b>	<b>146,505,029.00</b>	
<b>IX SANGGAR</b>					
1	Piong	10,235,620.00	6,505,950.00	16,741,570.00	
2	Boro	10,235,620.00	7,612,864.00	17,848,484.00	
3	Kore	10,235,620.00	14,207,177.00	24,442,797.00	
4	Taloko	10,235,620.00	7,770,216.00	18,005,836.00	
5	Oi Saro	10,235,620.00	5,891,932.00	16,127,552.00	
6	Sandue	10,235,620.00	5,945,629.00	16,181,249.00	
		<b>61,413,720.00</b>	<b>47,933,768.00</b>	<b>109,347,488.00</b>	



NO	KECAMATAN / DESA	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			KET.
		Alokasi Bagi Secara Merata (40%)	Alokasi Bagi Secara Proporsional (60%)	Jumlah Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa	
1	2	3	4	5 = 3+4	6
<b>X</b>	<b>AMBALAWI</b>				
1	Nipa				
2	Tolowita	10,235,620.00	19,405,694.00	29,641,314.00	
3	Rite	10,235,620.00	9,794,531.00	20,030,151.00	
4	Mawu	10,235,620.00	16,082,060.00	26,317,680.00	
5	Talipiti	10,235,620.00	18,010,198.00	28,245,818.00	
6	Kole	10,235,620.00	10,024,453.00	20,260,073.00	
		10,235,620.00	5,896,418.00	16,132,038.00	
		<b>61,413,720.00</b>	<b>79,213,354.00</b>	<b>140,627,074.00</b>	
<b>XI</b>	<b>LANGGUDU</b>				
1	Wawonda	10,235,620.00	12,683,192.00	22,918,812.00	
2	Karumbu	10,235,620.00	17,796,657.00	28,032,277.00	
3	Rupe	10,235,620.00	27,267,093.00	37,502,713.00	
4	Kalodu	10,235,620.00	2,875,285.00	13,110,905.00	
5	Kawru	10,235,620.00	2,983,039.00	13,218,659.00	
6	Doro O'o	10,235,620.00	17,814,094.00	28,049,714.00	
7	Laju	10,235,620.00	25,971,154.00	36,206,774.00	
8	Kangga	10,235,620.00	20,245,985.00	30,481,605.00	
9	Karumpi	10,235,620.00	19,844,071.00	30,079,691.00	
10	Waduruka	10,235,620.00	10,770,203.00	21,005,823.00	
11	Dumu	10,235,620.00	8,164,690.00	18,400,310.00	
12	Rompo	10,235,620.00	6,025,876.00	16,261,496.00	
13	Sarie Ruma	10,235,620.00	5,376,582.00	15,612,202.00	
14	Pusu	10,235,620.00	4,333,155.00	14,568,775.00	
15	Sambane	10,235,620.00	8,108,292.00	18,343,912.00	
		<b>153,534,300.00</b>	<b>190,259,368.00</b>	<b>343,793,668.00</b>	
<b>XII</b>	<b>LAMBU</b>				
1	Kaleo	10,235,620.00	8,160,509.00	18,396,129.00	
2	Simpasu	10,235,620.00	19,817,290.00	30,052,910.00	
3	Mangge	10,235,620.00	1,650,425.00	11,886,045.00	
4	Lanta	10,235,620.00	18,857,058.00	29,092,678.00	
5	Ngglu	10,235,620.00	4,539,382.00	14,775,002.00	
6	Rato	10,235,620.00	15,241,427.00	25,477,047.00	
7	Sumi	10,235,620.00	26,594,539.00	36,830,159.00	
8	Soro	10,235,620.00	13,910,904.00	24,146,524.00	
9	Lambu	10,235,620.00	10,523,639.00	20,759,259.00	
10	Hidirasa	10,235,620.00	1,951,878.00	12,187,498.00	
11	Lanta Barat	10,235,620.00	8,466,554.00	18,702,174.00	
12	Melayu	10,235,620.00	8,695,246.00	18,930,866.00	
13	Sangga	10,235,620.00	8,833,542.00	19,069,162.00	
14	Monta Baru	10,235,620.00	10,272,265.00	20,507,885.00	
		<b>143,298,680.00</b>	<b>157,514,658.00</b>	<b>300,813,338.00</b>	
<b>XIII</b>	<b>MADAPANGGA</b>				
1	Woro	10,235,620.00	13,126,793.00	23,362,413.00	
2	Campa	10,235,620.00	12,263,818.00	22,499,438.00	
3	Mpuri	10,235,620.00	16,249,597.00	26,485,217.00	
4	Ndano	10,235,620.00	6,118,724.00	16,354,344.00	
5	Monggo	10,235,620.00	121,813,874.00	132,049,494.00	
6	Derna	10,235,620.00	13,291,288.00	23,526,908.00	
7	Rade	10,235,620.00	16,489,988.00	26,725,608.00	
8	Tonda	10,235,620.00	16,301,860.00	26,537,480.00	
9	Bolo	10,235,620.00	59,638,556.00	69,874,176.00	
10	Mada Wau	10,235,620.00	4,846,326.00	15,081,946.00	
11	Ncandi	10,235,620.00	4,775,294.00	15,010,914.00	
		<b>112,591,820.00</b>	<b>284,916,118.00</b>	<b>397,507,938.00</b>	
<b>XIV</b>	<b>TAMBORA</b>				
1	Labuan Kananga	10,235,620.00	3,412,189.00	13,647,809.00	
2	Kawinda Nae	10,235,620.00	1,193,783.00	11,429,403.00	
3	Kawinda Toi	10,235,620.00	3,599,757.00	13,835,377.00	
4	Oi Panihi	10,235,620.00	3,334,859.00	13,570,479.00	
5	Oi Bura	10,235,620.00	3,101,458.00	13,337,078.00	
6	Oi Katupa	10,235,620.00	0.00	10,235,620.00	
7	Rasabou	10,235,620.00	3,673,179.00	13,908,799.00	
		<b>71,649,340.00</b>	<b>18,315,225.00</b>	<b>89,964,565.00</b>	

No	KECAMATAN / DESA	BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			KET.
		Alokasi Bagi Secara Merata (40%)	Alokasi Bagi Secara Proporsional (60%)	Jumlah Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Per Desa	
1	2	3	4	5 = 3+4	6
<b>XV</b>	<b>SOROMANDI</b>				
1	Bajo				
2	Punti	10,235,620.00			
3	Wadu Kopa	10,235,620.00	7,727,796.00	17,963,416.00	
4	Kananta	10,235,620.00	7,202,050.00	17,437,670.00	
5	Sai	10,235,620.00	2,641,242.00	12,876,862.00	
6	Sampungu	10,235,620.00	12,227,236.00	22,462,856.00	
7	Lewintana	10,235,620.00	8,932,564.00	19,168,184.00	
		10,235,620.00	5,125,051.00	15,360,671.00	
		10,235,620.00	3,595,321.00	13,830,941.00	
		<b>71,649,340.00</b>	<b>47,451,260.00</b>	<b>119,100,600.00</b>	
<b>XVI</b>	<b>PARADO</b>				
1	Parado Wane				
2	Parado Rato	10,235,620.00	15,382,417.00	25,618,037.00	
3	Kuta	10,235,620.00	22,506,363.00	32,741,983.00	
4	Kanca	10,235,620.00	8,982,120.00	19,217,740.00	
5	Lere	10,235,620.00	10,483,859.00	20,719,479.00	
		10,235,620.00	1,737,632.00	11,973,252.00	
		<b>51,178,100.00</b>	<b>59,092,391.00</b>	<b>110,270,491.00</b>	
<b>XVII</b>	<b>LAMBITU</b>				
1	Kaboro				
2	Kuta	10,235,620.00	7,365,407.00	17,601,027.00	
3	Sumbori	10,235,620.00	6,344,920.00	16,580,540.00	
4	Tetu	10,235,620.00	10,213,725.00	20,449,345.00	
5	Kaowa	10,235,620.00	8,861,136.00	19,096,756.00	
6	Londu	10,235,620.00	4,172,803.00	14,408,423.00	
		10,235,620.00	2,872,356.00	13,107,976.00	
		<b>61,413,720.00</b>	<b>39,830,347.00</b>	<b>101,244,067.00</b>	
<b>XVIII</b>	<b>PALIBELO</b>				
1	Panda	10,235,620.00	44,802,890.00	55,038,510.00	
2	Belo	10,235,620.00	15,154,345.00	25,389,965.00	
3	Tonggondou	10,235,620.00	10,755,063.00	20,990,683.00	
4	Tonggorisa	10,235,620.00	6,327,300.00	16,562,920.00	
5	Teke	10,235,620.00	13,406,268.00	23,641,888.00	
6	Ntonggu	10,235,620.00	12,177,197.00	22,412,817.00	
7	Nata	10,235,620.00	10,630,258.00	20,865,878.00	
8	Dore	10,235,620.00	3,558,850.00	13,794,470.00	
9	Roi	10,235,620.00	6,911,140.00	17,146,760.00	
10	Ragi	10,235,620.00	6,026,857.00	16,262,477.00	
11	Padolo	10,235,620.00	2,643,024.00	12,878,644.00	
12	Bre	10,235,620.00	4,391,590.00	14,627,210.00	
		<b>122,827,440.00</b>	<b>136,784,782.00</b>	<b>259,612,222.00</b>	
		<b>1,955,003,420.00</b>	<b>2,287,723,761.00</b>	<b>4,242,727,181.00</b>	

BUPATI BIMA

Ttd

HJ. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Sesuai Salinan dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


  
 AMAR MARUF

Nip. 196603111993031007